



PERATURAN DESA

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA PERUBAHAN)
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sragen dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
22. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 04);
23. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN
2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
100 N. 5TH ST. NEW YORK 17, N.Y.

5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka

peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya

lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Perubahan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa Perubahan.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.

RKP Desa Perubahan Tahun Anggaran 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal
usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala
Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan
yang Masuk ke Desa.
 2. Data dan informasi tentang rencana
pembiayaan pembangunan Desa.
 3. Rancangan RKP Desa Perubahan
Tahun Anggaran 2024.
 4. Gambar Desain Kegiatan.
 5. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 6. Daftar Usulan RKP Desa Perubahan
Tahun Anggaran 2024.
 7. Berita acara hasil penyusunan
rancangan RKP Desa Perubahan.
 8. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia
Musrenbang Desa RKP Desa
Perubahan Tahun Anggaran 2024.
 9. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa
Perubahan.
 10. Penyusunan Prioritas Program dan
Kegiatan.
 11. Berita Acara Musrenbang Desa RKP
Desa Perubahan Tahun Anggaran
2024, Notulen dan Daftar Hadir.
 12. Dokumen Rancangan RKP Desa
Perubahan Tahun Anggaran 2024.
 13. Berita Acara Musyawarah Desa tentang
pembahasan, penyepakatan dan
pengesahan rancangan RKP Desa
Perubahan Tahun Anggaran 2024,
Notulen dan Daftar Hadir.
 14. Dokumen RKP Desa Tahun Anggaran
2024.
 15. Peta Desa.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Perubahan Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Diundangkan di : Desa Sidoharjo
Pada tanggal : 18 Desember 2023
KEPALA DESA SIDOHARJO,

Diundangkan di : Desa Sidoharjo
Pada tanggal : 18 Desember 2023
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO

SUGIYANTO
LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 9

**MATRIX RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA PERUBAHAN
RKP DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

SIDOHARJO
SIDOHARJO
SRAGEN
JAWA TENGAH

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksana Kegiatan			
	Bidang	Sub Bidang		Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa														
				1	Penghasilan Tetap kepala Desa	18	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	13,00	OB	1 orang	12 bulan	52.000.000	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA	
				2	Tunjangan Kepala Desa dari Bengkulu	18	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	12,00	OB	1 orang	12 bulan	48.000.000	PAD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA	
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa														
				1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	18	10 orang telah memenuhi pagu maksimal	10 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	143,00	OB	10 orang	12 bulan	302.900.000	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA	
				2	Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkulu	18	10 orang telah memenuhi pagu maksimal	10 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	132,00	OB	10 orang	12 bulan	126.000.000	PAD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA	
				3	Tunjangan P8 Perangkat Desa	18	2 orang telah memenuhi pagu maksimal	2 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	24,00	OB	2 orang	12 bulan	10.800.000	PAD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA	
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa														
				1	BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa	1,3	1 orang terpenuhi jaminan sosial kades	1 orang terpenuhi pagu	Desa	12,00	OB	11 orang	12 bulan	2.995.200	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA	
				2	BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1,3	10 orang terpenuhi jaminan sosial perangkat desa	10 orang terpenuhi pagu	Desa	120,00	OB	11 orang	12 bulan	17.447.400	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA	
				4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)														
				1	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00	paket	11 orang	12 bulan	1.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA	
				2	Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00	paket	11 orang	12 bulan	1.500.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA	

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan					
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
					3 Belanja Bahan Bakar	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	1.100.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	7.200.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					5 Biaya Konsumsi	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	4.700.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					6 Belanja Pakian Dinas/Seragam/Atribut	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	7.400.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					7 Belanja Jasa Honorarium Petugas Ielang TKD	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	4.950.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					8 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	20.400.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					9 Belanja Jasa Honorarium Staff Administrasi BPD	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	3.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					10 Belanja Perjalanan Dinas	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	3.500.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					11 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	1.500.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					13 Belanja Alat Tulis kantor & Benda Pos	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	2.500.000	PLL	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					14 Belanja Alat Tulis kantor & Benda Pos	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	68.200	ADD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					15 Honorarium Petugas PKPKD & PPKD	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	16.200.000	ADD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					16 Belanja Jasa Langganan Listrik	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	19.080.000	ADD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					17 Belanja Jasa Langganan PDAM	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	11 orang	12 bulan	1.800.000	ADD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				
					5	Penyediaan Tunjangan BPD															
						1 Tunjangan BPD	18	9 orang telah memenuhi pagu definit	9 orang telah memenuhi pagu definit	Desa	108,00 OB	9 orang	12 bulan	39.000.000	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA			
						2 BPJS Ketenagakerjaan BPD		9 orang terpenuhi jaminan sosial BPD	9 orang terpenuhi pagu	Desa	108,00 OB	9 orang	12 bulan	1.814.400	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA			
					6 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakialan Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)																
					1 Operasional BPD	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	9 orang	12 bulan	33.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA				

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW													
				1	Insentif RT/RW	18	23 orang telah memenuhi pagu definitif	23 orang telah memenuhi pagu definitif	Desa	276,00 OB	23 orang	12 bulan	96.600.000	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA	
				2	BPJS Ketenagakerjaan RT	18	23 orang terpenuhi jaminan sosial RT	23 orang terpenuhi pagu	Desa	276,00 OB	23 orang	12 bulan	4.636.600	ADD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA	
				3	Operasional RT/RW	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	23 orang	12 bulan	27.600.000	PAD	swakelola	Kaur Keuangan	PKA	
				8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa													
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Keagamaan/Tarling	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	23 orang	12 bulan	9.000.000	DDS	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA	
				2	Kegiatan Bantuan Logistik Korban Bencana	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	23 orang	12 bulan	14.000.000	DDS	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA	
				3	Kegiatan Koordinasi Pemerintah Desa	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	23 orang	12 bulan	7.000.000	DDS	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA	
				4	Kegiatan Penyelenggaraan HUT RI	18	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	23 orang	12 bulan	5.000.000	DDS	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA	
			1,2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan												
					1	Printer	18	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	2,00 unit	11 orang	5 hari	5.300.000	PBH	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA
					2	Hard disk External	18	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	1 orang	5 hari	1.200.000	PBH	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA
					3	Mesin Scanner	18	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	11 orang	5 hari	8.500.000	PBH	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA
				2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa													
						1	Pengecatan Gedung Kantor	18	terpenuhinya sarpras kantor desa	terpenuhinya sarpras kantor desa	Desa	1,00 unit	11 orang	20 hari	11.333.000	PBH	swakelola	Kaur Umum & TU
			1,3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**												

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaa an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Statistik dan Kearsipan	1	1. Pemutakhiran Profil Desa	16	terpenuhinya data profil desa	terpenuhinya data profil desa	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Januari	975.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA
					2. Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)	16	terpenuhinya data IDM	terpenuhinya data IDM	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Januari	975.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA
					3. Penyusunan SDGs Desa	16	terpenuhinya data SDGs	terpenuhinya data SDGs	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Januari	975.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA
					4. Penyusunan Sejarah Desa	16	terpenuhinya data Sejarah Desa	terpenuhinya data Sejarah Desa	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Maret	15.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA
					5. Pemutakhiran eHDW Desa	16	terpenuhinya data eHDW	terpenuhinya data eHDW	Desa	1,00 paket	100 KK	Januari	630.000	DD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA
	1,4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll. bersifat reguler)													
				1. Terselenggaranya Musyawarah Desa Perencanaan Desa (RKP Desa)	16	terpenuhinya legalitas RKP Desa	terpenuhinya legalitas RKP Desa	Desa	4,00 kali	4.045 orang	Juni - september	3.200.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
				2. Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	16	terpenuhinya legalitas musrenbangdes	terpenuhinya legalitas musrenbangdes	Desa	1,00 kali	4.045 orang	september	1.300.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
				3. Terselenggaranya Musyawarah Pembahasan APB Desa	16	terpenuhinya legalitas APB Desa	terpenuhinya legalitas APB Desa	Desa	3,00 kali	4.045 orang	Oktober - desember	3.000.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan	PKA	
				4. Terselenggaranya Pembahasan LPPD, IPPD & LKPPD	16	terpenuhinya legalitas laporan kepala desa	terpenuhinya legalitas laporan kepala desa	Desa	1,00 kali	4.045 orang	Januari - maret	1.025.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan	PKA	
				2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rembug warga, dll. yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)												
				1. Mudessus Penerima BLT	16	terpenuhinya legalitas Penerima BLT	terpenuhinya legalitas Penerima BLT	Desa	1,00 kali	22 orang	Januari	1.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
				2. Musyawarah Pemerintah Desa	16	terpenuhinya legalitas Administrasi Desa	terpenuhinya legalitas Administrasi Desa	Desa	1,00 kali	11 orang	Januari - Desember	6.600.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan				
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				3	Musyawarah Desa Rembug Stunting	16	terpenuhinya legalitas Stunting	terpenuhinya legalitas Stunting	Desa	1,00 kali	4.045 orang	Maret	1.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA			
					Musyawarah Desa Penetapan Masterplan & Batas Desa	16	terpenuhinya legalitas Master Plan & Batas Desa	terpenuhinya legalitas Master Plan & Batas Desa	Desa	1,00 kali	4.045 orang	Oktober	2.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA			
					Musyawarah Desa Pembahasan & Penetapan Perdes/Perkades	16	terpenuhinya legalitas Produk Hukum Desa	terpenuhinya legalitas Produk Hukum Desa	Desa	5,00 kali	30 Orang	Januari - Desember	6.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA			
					Musyawarah Desa Sosialisasi Perdes/Perkades	16	terpenuhinya legalitas Produk Hukum Desa	terpenuhinya legalitas Produk Hukum Desa	Desa	5,00 kali	400 Orang	Januari - Desember	5.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA			
				3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)															
					1 Penyusunan Dokumen RKP Desa	16	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen RKP Desa	terpenuhinya penyusunan dokumen RKP Desa yang baik	Desa	1,00 paket	4.045 orang	juni - september	10.325.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan	PKA			
				4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)															
					1 Penyusunan Realisasi, Penetapan & Perubahan APB Desa	16	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen APB Desa	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen APB Desa yang baik	Desa	3,00 paket	4.045 orang	Januari, Oktober & Desember	4.275.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan	PKA			
				5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa															
					1 Penilaian Aset Desa	16	terpenuhinya operasional penilaian aset desa	terpenuhinya operasional penilaian aset desa	Desa	1,00 paket	11 orang	Januari	5.000.000	OD	swakelola	Kaur Umum & TU	PKA			
				5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)															
					1 Penyusunan Perdes/Perkades	16	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen perdes/perkades	terpenuhinya penyusunan dokumen perdes/perkades yang baik	Desa	6,00 paket	4.045 orang	Januari - desember	5.700.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA			

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang		Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				6	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)													
				1	Penyusunan LPPD, IPPD & LKPPD	16	terpenuhinya operasional penyusunan dokumen LPPD, IPPD & LKPPD	terpenuhinya penyusunan dokumen LPPD, IPPD & LKPPD yang baik	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Januari	1.425.000	PAD	swakelola	Kaur Perencanaan	PKA	
				7	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)													
				1	Penjaringan Perangkat Desa	16	terpenuhinya operasional penjaringan Perangkat Desa	terpenuhinya operasional penjaringan Perangkat Desa	Desa	1,00 paket	2 orang	Oktober	72.270.101	Silpa ADD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
				2	Pengisian BPD Periode 2025 - 2030	16	terpenuhinya operasional pemilihan BPD	terpenuhinya operasional pemilihan BPD	Desa	1,00 paket	9 orang	Nopember	10.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
				1.5	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)											
				1	Biaya Pajak Bumi & Bangunan Desa	16	terpenuhi tertib pajak PBB Desa	terpenuhinya tertib pajak PBB Desa	Desa	1,00 paket	2.100 orang	maret	13.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
Jumlah Per Bidang 1													1.090.700.101					
2	Pembangunan Desa	2.1	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)													
				1	Kegiatan Honor Pengajar TK. Perliwi 1, 2 & 4	4,16	7 orang terpenuhi honor pengajar TK	7 orang terpenuhinya honor pengajar TK	Desa	1,00 paket	64 orang	12 bulan	21.000.000	DOS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA	
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**													

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaa an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan				
	Bidang		Sub Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					1 Kegiatan Lanjutan Finishing Gedung Kelas TK PERTIWI 4	4,16	terpenuhi kebutuhan sarpras TK	terpenuhinya kebutuhan sarpras TK	RT 15	1,00 unit	70 orang	Juli	15.000.000	DDS	swakelola	Kasi Kesra	PKA			
					2 Rehabilitasi TK Pertiwi 1	4,16	terpenuhi kebutuhan sarpras TK	terpenuhinya kebutuhan sarpras TK	RT 10	1,00 unit	70 orang	Nopember	50.000.000	PSK	swakelola	Kasi Kesra	PKA			
					2.2	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)												
								1 Kegiatan Gerakan Sayang Ibu	3,5	terpenuhi gizi ibu & anak	terpenuhinya gizi ibu & anak	Desa	456,00 unit	ibu hamil	12 bulan	9.120.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA
								2 Kegiatan PMT Lansia	3,5	terpenuhi gizi lansia	terpenuhinya gizi lansia	Desa	2.400,00 orang	lansia	12 bulan	18.300.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA
								3 Kegiatan PMT Balita	3,5	terpenuhi gizi balita	terpenuhinya gizi balita	Desa	3.120,00 unit	balita	12 bulan	31.200.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA
								4 Kegiatan Penanganan Balita Stunting	3,5	terpenuhi gizi anak stunting	terpenuhinya gizi anak stunting	Desa	240,00 orang	anak stunting	12 bulan	15.600.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA
								5 Kegiatan Penanganan HIV/AIDS	3,5	terpenuhi gizi Penderita HIV/AIDS	terpenuhi gizi Penderita HIV/AIDS	Desa	72,00 orang	ibu	12 bulan	1.800.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA
								6 Kegiatan Insentif Kader Kesehatan	3,5	50 orang terpenuhi pagu minimal	50 orang terpenuhinya pagu minimal	Desa	600,00 OB	kader kesehatan	12 bulan	18.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA
								7 Kegiatan Posyandu Remaja	3,5	Terpenuhi akan SDM remaja	Terpenuhinya akan SDM remaja	Desa	140,00 orang	Remaja	4 bulan	2.800.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA
								8 Kegiatan Posbindu	3,5	Terpenuhi akan operasional Posbindu	Terpenuhi akan operasional Posbindu	Desa	480,00 orang	Remaja	12 bulan	4.800.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA
								9 Kegiatan APE	3,5	Terpenuhi akan operasional	Terpenuhi akan operasional	Desa	10,00 paket		12 bulan	3.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA
				10 Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan	3,5	Terpenuhi akan SDM Kader	Terpenuhi akan SDM Kader	Desa	1,00 paket	kader kesehatan	Mei	1.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA				
					2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani												
								1 Kegiatan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sri luhit 1 - 7 dari PKTD	1,2	terpenuhi kesejahteraan PKTD	terpenuhinya kesejahteraan PKTD	Desa	100,00 HOK	100 orang	oktober	9.500.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis kegiatan	Jumlah (Rp.)								Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **												
					1 Pengaspalan Jalan Dk Badran	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 01	300,00 m	250 orang	Mei	100.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					2 Pengaspalan Jalan Dk Sidomulyo	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 02 - 16	300,00 m	300 orang	Mei	100.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					3 Pengecoran Jalan Dk Sidoharjo	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 03	154,00 m	250 orang	Mei	50.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					4 Pengecoran Jalan Dk Banyuning	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 04	125,00 m	250 orang	Mei	50.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					5 Pengecoran Jalan Dk Pungkruk	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 05	313,00 m	260 orang	Mei	100.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					6 Pengecoran Jalan Dk Kranggan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 06	313,00 m	190 orang	Mei	100.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					7 Pengaspalan Jalan Dk Wirun	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 07, 17, 18, 19	504,00 m	420 orang	Mei	150.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					8 Peningkatan Jalan Dk Kileo Wetan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 08	100,00 m	300 orang	Mei	100.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					9 Pengecoran Jalan Dk Kileo Wetan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 09	200,00 m	300 orang	Mei	50.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					10 Lanjutan Pengecoran Jalan Dk Kileo Kulon	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 10	300,00 m	270 orang	Mei	100.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					11 Pengaspalan Jalan Dk Tobongan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 11	150,00 m	173 orang	Mei	50.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					12 Pengaspalan Jalan Dk Nglebak	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 12	334,00 m	375 orang	Mei	100.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					13 Lanjutan Cor Jalan Dk Nglebak	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 13	233,00 m	250 orang	Mei	75.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					14 Pengecoran Jalan Dk Piasan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 14	200,00 m	150 orang	Mei	75.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					15 Pengaspalan Jalan Dk Piasan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 15	250,00 m	300 orang	Mei	75.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					16 Pengaspalan Jalan Dk Piasan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 20	250,00 m	300 orang	Mei	75.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					17 Pengaspalan Jalan Dk Nglebak	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 12	300,00 m	150 orang	Mei	100.000.000	PBP	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					18 Lanjutan Balai Pertemuan Dk Kileo Wetan RT 8	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras masyarakat	RT 08	1,00 Unit	150 orang	Mei	100.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK
					19 Renovasi Masjid Desa Dk Sidomulyo												

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis kegiatan	Jumlah (Rp.)								Sumber Dana								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				19	Pengaspalan Jalan Dk. Pungkrut RT 5	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras masyarakat	RT 05	1,00 Unit	150 orang	Mei	30.000.000	PBK	pihak ketiga	Kasi Kesra	TPK			
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani															
				1	Kegiatan Pengcoran JUT Sri Luwih 7	1,2,9	belum terpenuhi pembangunan Jalan usaha tani	belum terpenuhi pembangunan Jalan usaha tani	Sri Luwih 7	1,00 paket	100 orang	September	100.000.000	DDS	swakelola	Kasi Kesra	PKA			
				2	Kegiatan Lanjutan Talud JUT Sri Luwih 7	1,2,9	belum terpenuhi pembangunan Jalan usaha tani	belum terpenuhi pembangunan Jalan usaha tani	Sri Luwih 7	1,00 paket	100 orang	September	100.000.000	DDS	swakelola	Kasi Kesra	PKA			
				3	Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Telford Sri Luwih 1	1,2,9	belum terpenuhi pembangunan Jalan usaha tani	belum terpenuhi pembangunan Jalan usaha tani	Sri Luwih 1	1,00 paket	100 orang	September	35.000.000	DDS	swakelola	Kasi Kesra	PKA			
				4	Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Telford Sri Luwih 6	1,2,9	belum terpenuhi pembangunan Jalan usaha tani	belum terpenuhi pembangunan Jalan usaha tani	Sri Luwih 6	1,00 paket	100 orang	September	35.000.000	DDS	swakelola	Kasi Kesra	PKA			
				4	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **															
				1	Kegiatan Pembuatan Peta Batas Desa	16	terpenuhi dokumen peta batas desa	terpenuhi dokumen peta batas desa	Desa	1,00 paket	12 dukuh	mei	50.000.000	DDS	pihak ketiga	Kasi Pemerintahan	PKA			
				5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa															
				1	Kegiatan Pembuatan Master Plan Desa	16	terpenuhinya Master Plan Desa	terpenuhinya Master Plan Desa	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Mei	60.000.000	DDS	pihak ketiga	Kasi Pemerintahan	PKA			
				2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa													
						1	Kegiatan Operasional Pengelola Lingkungan Hidup	13	terpenuhinya pengelolaan lingkungan	terpenuhinya pengelolaan lingkungan	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Mei	18.631.000	DDS	swakelola	Kasi Kesra	PKA	
				2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)													
		1	Pengadan MMT Informasi Realisasi, penetapan & Perubahan APB Desa	16	terpenuhi transparansi informasi pelaksanaan anggaran desa	terpenuhinya transparansi informasi pelaksanaan anggaran desa	Desa	3,00 kali	4.045 orang	september, desember	4.500.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA					
		2	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa																	

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan					Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang		Jenis kegiatan	Jumlah (Rp.)								Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					1 Kegiatan Biaya Internet Kantor Desa	16	terpenuhi kebutuhan internet desa	terpenuhinya kebutuhan internet desa	Desa	12,00 unit	13 orang	12 bulan	15.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
					2 Kegiatan Pembuatan Podcast Desa	16	terpenuhi kebutuhan podcast desa	terpenuhi kebutuhan podcast desa	Desa	1,00 unit	13 orang	September	60.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
Jumlah Per Bidang 2													2.259.061.000					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	3.1 Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)														
				1 Honorarium Linmas	11	31 orang telah memenuhi pagu definitif	31 orang telah memenuhi pagu definitif	Desa	31,00 orang	31 orang	desember	15.500.000	ADD	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA		
		3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa														
				1 Kegiatan HUT Desa Sidoharjo	11	terpenuhinya kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	4.045 orang	Agustus - Desember	40.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA		
		3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**														
				1 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lapangan Desa	11	belum terpenuhi sarpras olahraga	belum terpenuhi sarpras olahraga	Desa	1,00 paket	4.045 orang	agustus - September	100.000.000	DDS	swakelola	Kasi Kesra	PKA		
		3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD														
				1 Pembinaan LPMD		terpenuhi operasional LPMD	terpenuhinya operasional LPMD	Desa	1,00 paket	3 orang	12 bulan	12.000.000	ADD	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA		
			2 Pembinaan KPMD		terpenuhi operasional KPMD	terpenuhinya operasional KPMD	Desa	1,00 paket	5 orang	12 bulan	5.000.000	PBP	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA			
			2	Pembinaan PKK														
1 Honor Pengurus TP PKK	11			7 orang telah memenuhi pagu definitif	7 orang telah memenuhi pagu definitif	Desa	7,00 orang	7 orang	desember	2.800.000	ADD	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA				
2 Operasional PKK	11			terpenuhi kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	40 orang	12 bulan	12.000.000	ADD	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA				
3 Operasional PKK	11	terpenuhi kebutuhan reguler	terpenuhinya kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	40 orang	12 bulan	5.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA						

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis kegiatan	Jumlah (Rp.)								Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Jumlah Per Bidang 3													192.300.000				
	4.2	Sub Bidang Pertanian dan Perternakan	1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa													
			1	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Sumur Bor Sri Luwih 5		Terpenuhinya Kebutuhan Air untuk petani	Terpenuhinya Kebutuhan Air untuk petani	Sri Luwih 5	1,00 paket	40 orang	12 bulan	7.000.000	DDS	swakelola	Kasi Kesra	PKA	
			2	Kegiatan Penanaman Pohon Karas		Terpenuhinya Penanaman Pohon	Terpenuhinya Penanaman Pohon	TKD	1,00 paket	40 orang	1 bulan	25.000.000	DDS	swakelola	Kasi Kesra	PKA	
	4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa													
			1	Bimtek Kepala Desa	4,8	terpenuhinya peningkatan kapasitas kepala desa	terpenuhinya peningkatan kapasitas kepala desa	Desa	1,00 kali	1 orang	nopember	500.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
			2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa													
			1	Bimtek Perangkat Desa	4,8	terpenuhinya peningkatan kapasitas perangkat desa	terpenuhinya peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	1,00 kali	10 orang	nopember	2.500.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
			3	Peningkatan Kapasitas BPD													
			1	Bimtek BPD	4,8	terpenuhinya peningkatan kapasitas perangkat desa	terpenuhinya peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	1,00 kali	9 orang	nopember	2.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
			4	Peningkatan Kapasitas Lembaga Lainnya													
			1	Bimtek Lembaga Desa	4,8	terpenuhinya peningkatan kapasitas Lembaga desa	terpenuhinya peningkatan kapasitas Lembaga desa	Desa	1,00 kali	50 orang	nopember	2.000.000	PAD	swakelola	Kasi Pemerintahan	PKA	
	4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan													
			1	Kegiatan Operasional Sub. PPKBD	4	belum terpenuhinya pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan bagi perempuan	belum terpenuhinya pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan bagi perempuan	Desa	12,00 bulan	6 orang	12 bulan	6.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA	
			2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak													

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama antar desa/ kerjasama pihak ketiga)	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang		Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				3	1 Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Anak	4	belum terpenuhinya pelatihan dan penyuluhan kesadaran perlindungan bagi anak	belum terpenuhinya pelatihan dan penyuluhan kesadaran perlindungan bagi anak	Desa	12,00 bulan	70 orang	april	5.000.000	DDS	swakelola	Kasi Pelayanan	PKA
		4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milk Desa													
					1 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lingkungan Kios Desa	9	terpenuhinya sarpras kios desa	terpenuhinya sarpras kios desa	Desa	1,00 unit	30 Orang	April	400.000.000	DDS	swakelola	Kasi Kesra	PKA
Jumlah Per Bidang 4													423.000.000				
5	Bidang Penanggul angan Bencana, Darurat dan Mendesak	5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	1 Penanggulangan Bencana													
				1 Bantuan Sosial	15	belum adanya bencana di desa	tercukupinya kebutuhan jika terjadi bencana	Desa	1,00 paket	4.045 orang	12 bulan	3.300.000	PAD	swakelola	Kasi Kesra	PKA	
		5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak	2	1 Keadaan Mendesak													
					1 Kegiatan Bantuan Langsung Tunai	15	telah terpenuhi keadaan mendesak di desa	terpenuhinya kebutuhan dalam keadaan mendesak desa	Desa	22,00 KK	70 orang	12 bulan	79.600.000	DDS	swakelola	Kasi Kesra	PKA
Jumlah Per Bidang 5													82.900.000				
6	Pembiayaan	6.2 Penyertaan Modal Desa	1	1 Penyertaan Modal													
				1 Kegiatan Modal Bumdes		belum terpenuhinya akan modal BUMDES	terpenuhinya akan modal BUMDES	Desa	1,00 paket	Masyarakat	oktober	50.000.000	DDS	swakelola	Kaur Keuangan	PKA	
Jumlah Per Bidang 6													50.000.000				
JUMLAH TOTAL													4.097.951.101				



Desa Sidoharjo, tanggal 18 Desember 2023

Disusun oleh :
Sekretaris Desa

[Signature]
SUGIYANTO